

DELIK KESUSILAAN PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM HINDU

Oleh:

I Nyoman Alit Putrawan

Email: alitputrawan.80@gmail.com

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

ABSTRACT

The crime of rape is a form of crime against humanity that can cause Physical and Physical losses, especially the underage victims who can destroy their future. Hindu law considers that rape is a very big sin, in Sad Atatayi called Dratikrama that is raping (Darmayasa :116: 1995).. In Sarasamuccaya sloka 153, states that the act of rape should not be done because it can shorten the age. Manava Dharmasastra III.63, states that By having sex less than marriage/rape, by ignoring the Pawiwahan, Vedic ceremonies, doing in a humble way, not paying attention to the advice of the saint then the big, rich and influential families will fall apart. Rape is a tremendous sin and severely imposed sanctions. Similarly, the Criminal Code regulates the rape with corporal punishment and corporal punishment.

Factors The causes of rape crime include a). Moral (Age, education, position, Compliance of worship, the intensity of liquor), b). Economic factors, c). Environment, d) Motive Actors. The role of law enforcers in suppressing the crime of rape must be in synergy with the community so that sexual predators/rapists can be arrested and prosecuted as soon as possible and the recovery of victims both physically and psychally. Implementation of the application of punishment to the perpetrators based on the provisions of the criminal code and Hindu law derived from the composition of Hindu Law (manava Dharmasastra). The purpose of applying punishment according to Hindu and Criminal Code is to uphold the principle of justice and create peace in society.

Keywords: Rape, punishment, Hindu Law

ABSTRAK

Kejahatan pemerkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang dapat menimbulkan kerugian Fisik maupun Phisikis terlebih korbannya dibawah umur yang dapat menghancurkan masa depannya. Hukum Hindu memandang bahwa memperkosa adalah dosa yang sangat besar sekali, dalam Sad Atatayi di sebut dengan Dratikrama yaitu memperkosa (Darmayasa :116: 1995). Dalam Sarasamuccaya sloka 153, menyatakan bahwa perbuatan memperkosa jangan dilakukan karena dapat memperpendek umur. Manava Dharmasastra III.63 , menyatakan Bahwa Dengan berhubungan sex secara rendah di luar cara perkawinan/ memperkosa, dengan mengabaikan upacara pawiwahan, weda, melakukan dengan cara hina, tidak memperhatikan nasehat orang suci maka keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan. Pemerkosaan merupakan dosa yang sangat besar sekali dan di jatuhkan sanksi yang berat juga. Demikian juga KUHP mengatur tentang pemerkosaan itu dengan hukuman badan dan hukuman kebiri.

Faktor Penyebab terjadinya tindakan kejahatan pemerkosaan meliputi a). Moral (Umur,pendidikan,Kedudukan, Ketaatan beribadah, intensitas Minuman Keras), b). Faktor ekonomi, c).lingkungan, d) Motif Pelaku. Peranan penegak hukum dalam menekan kejahatan pemerkosaan

haruslah bersinergi dengan masyarakat, agar predator seksual/pemerksa dapat ditangkap dan diadili secepat mungkin serta pemulihan korban baik secara fisik dan psikis. Penerapan penerapan Sanksi hukuman kepada pelaku berdasarkan pada ketentuan KUHP dan Hukum Hindu yang bersumber pada Kompedium Hukum Hindu (manava Dharmasastra). Tujuan penerapan sanksi menurut Hukum hindu dan KUHP ini adalah untuk menjunjung asas keadilan serta menciptakan kedamaian di masyarakat.

Kata kunci: Pemerksaan, sanksi, Hukum Hindu

PENDAHULUAN

Kejahatan pemerksaan merupakan suatu bentuk kejahatan seperti perampasan atau perusakan terhadap mahkota yang tak ternilai yakni kehormatan dan keperawanan dari wanita. Meskipun masalah kejahatan pemerksaan sudah diatur normative dalam KUHP tetapi kenyataannya perlindungan terhadap korban pemerksaan masih belum memadai. Pemeriksaan terhadap korban sekaligus saksi harus benar-benar jelas bahwa korban diperksa, bila perlu harus disertai dengan visum et repertum untuk menguatkan pembuktian didalam laporan.

Hukum Hindu memandang bahwa memperksa adalah dosa yang sangat besar sekali, dalam Sad Atatayi di sebut dengan Dratikrama yaitu memperksa. Dalam Sarasamuccaya sloka 153 (Artadi, 43:1987), menyatakan bahwa perbuatan memperksa jangan dilakukan karena dapat memperpendek umur.

Manava Dharmasastra III.63, menyatakan Bahwa Dengan berhubungan sex secara rendah di luar cara perkawinan/ memperksa, dengan mengabaikan upacara pawiwahan, weda, melakukan dengan cara hina, tidak memperhatikan nasehat orang suci maka keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan. Dari uraian yang terdapat dalam ajaran agama hindu dan pustaka sucinya kejahatan pemerksaan merupakan dosa yang sangat besar sekali dan di jatuhkan sanksi yang berat juga.

PEMBAHASAN

Sugandhi (27: 1981) Delik atau tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman Pidana, atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Ter Haar mengartikan suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan imateriil milik hidup seorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dipulihkan kembali, macam serta besarnya reaksi ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan, lazimnya wujud reaksi itu adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang.

Menurut Ter Haar untuk adapat disebut delik, perbuatan itu harus mengakibatkan dalam kegoncangan neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat di langgar (R. Roesilo, 67:1984)). Menurut Kamus Hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat (Tim Penyusun. 221:2001.). Kesopanan (Zeden) pada umumnya menegenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas “Kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Delik kejahatan terhadap kesusilaan banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tahapan pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam batasan, kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Sarasamuccaya Sloka 153 menyatakan:

*Ikang kaparadaran, sarwadyani tan
ulahakena ika*

*Hawya angulahaken asing amuhara
alpayus*

Terjemahannya:

Mengenai enggoda / memperkosa wanita,
segala usaha itu jangan kau lakukan .

Pun juga jangan melakukan sesuatunya
yang memperpendek umur.

Kata Pemerkosaan dalam terjemahan tersebut diterjemahkan dengan kata menggoda atau memperkosa wanita. Kedua pengertian tersebut tidak sama walaupun kata Pemerkosaan dapat diartikan kedua-duanya itu. Dari arti kata itu kata *Pemerkosaan* lebih dekat dari pada memperkosa karena dengan pengertian yang terakhir, ada unsur kekerasan sedangkan yang pertama didasarkan pada atas kemauan yang bebas antara kedua belah pihak atau salah satu pihak merasa digoda. Walaupun demikian kedua perbuatan itu dilarang dan tercela. Menurut pasal 153 SS dinyatakan, hendaknya orang jangan sekali-kali perbuatan 1) melakukan Pemerkosaan; 2) melakukan perbuatan yang dapat memperpendek umur. Melakukan Pemerkosaan dianggap sebagai penyebab timbulnya bencana dan karena itu dapat

memperpendek umur. Lebih jauh dikemukakan bahwa bila seseorang berbuat *Pemerkosaan*, perbuatan itu memperpendek umur sedangkan sentuhan-sentuhan yang diperoleh berupa kenikmatan jasmani dengan seorang wanita yang bukan istrinya sama saja rasa itu dengan sentuhan kulit dengan istri sendiri. Kerena itu tidaklah ada gunanya melakukan perbuatan *Pemerkosaan*, (Pudja. 1979 :309)

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa Pemerkosaan merupakan kejahatan asusila terhadap wanita, baik itu wanita yang sudah bersuami, Gadis maupun anak-anak. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada *Pemerkosaan* yang terkait dengan kejahatan asusila terhadap wanita seperti pemerkosaan, pencabulan, perzinahan dan persetubuhan yang korban dari pada kejahatan asusila ini adalah perempuan yang beragama Hindu.

Delik Pemerkosaan Menurut Menurut KUHP

Kejahatan perkosaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP, pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan bersetubuh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 766), perkosaan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi....” Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukan berbagai bentuk

perbuatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain (.

Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkulaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

Mengenai tindak pidana perkosaan atau verkrachting, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pembedaannya terdapat dalam pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut: Perbuatannya : memaksa,

1. Caranya : 1) dengan kekerasan, 2) dengan ancaman kekerasan;
2. Seorang wanita bukan istrinya;
3. Bersetubuh dengan dia.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatas sebagai berikut:

Perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak

orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut. Satochid Kartanegara menyatakan:

“Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain”.

Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.

Kekerasan (geweld) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 285 disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “kekerasan”, hanya dalam Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan. Disebutkan : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” (Tithaamidjaja, 37: 95)

Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pemerkosaan

Banyak faktor yang melatarbelakangi dan berpengaruh terhadap seseorang hingga melakukan tindak kejahatan, bahkan mengulanginya sampai beberapa kali. Dalam analisis sebuah penelitian, telah diteliti 13 variabel yang diduga berpengaruh pada tindak kejahatan berulang. Ketiga belas variabel tersebut dikelompokkan dalam tiga kelompok variabel sesuai dengan sifatnya yaitu:

- (1) Kelompok variabel karakteristik dan moral
Kelompok ini terdiri dari 5 variabel yang meliputi:

- a. umur,
 - b. pendidikan,
 - c. kedudukan dalam rumah tangga,
 - d. ketaatan beribadah, dan
 - e. intensitas minum-minuman keras.
- (2) Kelompok variabel ekonomi Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi:
- a. sumber pendapatan,
 - b. rata-rata pendapatan,
 - c. beban tanggungan, dan
 - d. kecukupan biaya hidup.
- (3) Kelompok variabel lingkungan tempat tinggal clan pergaulan Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi:
- a. teman pergaulan sehari-hari,
 - b. kebiasaan menghabiskan waktu,
 - c. intensitas interaksi dengan tempat potensi kejahatan, dan
 - d. keamanan lingkungan tempat tinggal.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi atas:

1) *Seductive rape*

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

2) *Sadistic rape*

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.

3) *Anger rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4) *Domination rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5) *Exploitation rape.*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya (Suryono, 2001: 185).

Hukuman Pemerkosaan dalam Hukum Hindu

Hukum Hindu mengatur berbagai hal didalam kehidupan manusia, dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit seperti halnya hukum tata Negara. Namun perlu kita ketahui Hukum Hindu yang tertinggi adalah perbuatan baik, sedangkan bagi kebanyakan orang Hukum tertinggi adalah hal-hal yang diatur oleh Negara (Danda Niti,Danda Nagara). Hukum Hindu lebih menekankan pencegahan sedangkan Hukum agama lain dan Hukum Negara menekankan pada penghukuman atas pelaku – pelaku kejahatan, sehingga Hukum

Hindu seolah-olah tidak tampak dipermukaan atau didalam kehidupan masyarakat (Ekasana, 2002 :46) .

Penebusan dosa lelaki yang berzina:
Setelah menggauli seorang wanita candala atau svapaka, Seorang Brahmana harus berpuasa selama 3 malam dengan perkenaan para brahmana.

(Veda Smerti, Parasara Dharmasastra. X.5)

Ia harus mencukur kepalanya (rambut) bersama dengan kuncirnya, melaksanakan 3 upacara penebusan doa Prajapatya, dan setelah melaksanakan brahma kurcam (semacam penebusan dosa, dimana yang bertaubat telah berpuasa pada hari bulan penuh, minum pancagavyam pada hari berikutnya), harus menyenangkan para brahmana.

(Veda Smerti, Parasara Dharmasastra X.6)

Tambahan: ada seorang teman saya yang wanita beranggapan bahwa dengan mencukur rambut setelah berzina dengan pacarnya dosanya dapat dikurangi atau ditebus. Setelah saya cari-cari slokanya ternyata didalam kitab Arthasastra disebutkan bahwa seorang wanita dilarang mecukur rambut, apalagi rambut adalah mahkota bagi wanita.

Ia setiap hari harus mengucapkan Gayatri mantram , dan memberikan sedekah sapi atau sapi jantan muda (sebagai denda) kepada seorang Brahmana, yang karenanya dosa-dosanya secara pasti terhapuskan.

(Veda Smerti, Parasara Dharmasastra X.7)

Tambahan: mungkin anda menganggap hal ini lucu, hanya dengan mengucapkan gayatri mantram dan bersedekah sapi dosanya dapat dihapuskan? Maksud dari seloka ini bahwa seseorang yang bertaubat dan tidak akan pernah lagi berzina serta selalu mengucapkan gayatri mantra secara terus menerus sepanjang hidupnya maka ia bisa dihapuskan dosa-dosanya.

Setelah menggauli seorang candala (wanita diluar catur warna) atau svapaka , seorang ksatria atau vaisya melaksanakan 2 penebusan dosa prajapatya , dan memberikan sedekah seekor sapi atau sapi jantan muda kepada brahmana .

(Veda Smerti, Parasara Dharmasastra. X.8)

Tambahan: penebusan dosa bagi ksatria dan vaisya lebih ringan daripada penebusan dosa golongan brahmana yaitu selisih lagi 1 upacara parajapatya, sedangkan bagi sudra hanya melaksanakan 1 upacara penebusan dosa prajapatya

Seorang sudra, setelah menggauli seorang wanita candala atau svapaka , harus melaksanakan penebusan dosa prajapatya dan memberikan sedekah seekor sapi atau sapi jantan muda kepada brahmana.

(Veda Smerti, Parasara Dharmasastra X.9)

Aturan penebusan dosa berhubungan seks bapak dengan anak, ibu dengan anak dan lain sejenisnya telah diuraikan pada Manava Dharmasastra.

Penebusan dosa bagi wanita yang berzina:

Setelah berhubungan dengan sesaudara dengan seorang candala (lelaki diluar catur warna), wanita harus mengakui kesalahannya kepada 10 brahmana terkenal.

(veda smerti, Parasara Dharmasastra, X.18)

Tambahan: kekeliruan wanita adalah tidak berani mengakui kesalahannya setelah berzina untuk mengakui kepada Brahmana. Jangankan 10 brahmana terkenal, tetangganyapun tidak diberitahukan. Perlu sekalilah wanita mengakui kesalahannya kepada orang-orang suci agar diberikan tuntunan oleh beliau agar mendapat pencerahan dan kesucian. Didalam kitab suci hindu yang pernah saya baca disebutkan bahwa dengan bergaul ataupun berbicara dengan seorang brahmana dapat memberikan kesucian

bagi seseorang. Namun dijamin sekarang susah menemukan brahmana yang benar-benar orang suci lahir batin.

Para wanita dari semua golongan sosial harus melaksanakan 1 upacara penebusan dosa krcchra candrayana, berkenaan dengan hal tersebut, seorang wanita seperti bumi, dapat menderita tanpa pencemaran.

(Veda Smerti, Parasara Dharmasastra, X.24)

Seorang wanita yang secara paksa diperkosa oleh seorang laki-laki, dalam keadaan tertangkap, demikian pula dia yang memberikan kesempatan karena secara fisik lebih kuat (yang laki-laki), atau Karen membahayakan jiwanya, dapat memperoleh kesuciannya kembali dengan melaksanakan penebusan dosa santapanam. inilah yang ditetapkan oleh Parasara (Parasara Muni),

(Veda Smerti, Parasara Dharmasastra, X.25)

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian mengenai Delik kesusilaan Pemerksaan Menurut Hukum Hindudiasdapatdisimpulkanbeberapahal yang penting antara lain: Faktor Penyebab terjadinya tindakan kejahatan pemerksaan meliputi 1). moral (Umur, pendidikan, Kedudukan, Ketaatan beribadah, intensitas Minuman Keras), 2). Faktor ekonomi, 3). lingkungan, 4) Motif Pelaku, Peranan penegak hukum dalam menekan kejahatan pemerksaan haruslah bersinergi dengan masyarakat, agar predator seksual/ pemerksa dapat ditangkap dan diadili secepat mungkin serta pemulihan korban baik secara Fisik dan Spisikis. Penerapan Sanksi hukuman kepada pelaku berdasarkan pada ketentuan KUHP dan Hukum Hindu yang bersumber pada Kompedium Hukum Hindu (Manava Dharmasastra).

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 1987. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi* : Setia Kawan.
- Dharmayasa, I Made. 1995 *Canakya Niti sastra*. Denpasar: Dharma Naradha
- Dharmayuda. I Made Suasthawa, 2001. *Desa Adat (kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali)*. Denpasar : Upada Sastra.
- Dherana, Tjok Raka. 1984. *Hubungan Agama Dengan Adat*, Diperbanyak Untuk Dipakai di IHDN Denpasar.
- Ekasana, I Made Suastika. 2002. *Vyavahara Ācāra (Hukum Acara Hindu)*. Denpasar, Tanpa Penerbit.
- Ekasana, I Made Swastika, 2002. *Dampak Hukum Perbuatan Paradara Pada masyarakat Hindu di Bali*. Penelitian : IHDN Denpasar
- Pudja. 1979. *Manawa Dharma Sastra*. Jakarta : CV. Pelita Nursatama Lestari
- R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- R. Roesilo. 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : alfabeta.
- Surpha, I Wayan, 1993. *Eksistensi Desa Adat Di Bali*. Denpasar : Upada Sastra.
- Tim Penyusun. 2001. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga". Jakarta. Balai Pustaka.

Tirtaamidjaja. 1995. Pokok-Pokok Hukum Pidana . Jakarta; Fasco.

Wirjono Prodjodikoro. 1989 , Asas-Asas Hukum Pidana Di Iandonesia . Bandung; Eresco.

Sumber Undang-undang/Legal Law:

1. KUHP Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76.1981
2. Perpu No. 1 Tahun 2016